

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara–negara di Asia Tenggara dan Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung dalam ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dalam Deklarasi Bangkok yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT ASEAN tersebut diselenggarakan informal, hal ini dikarenakan krisis keuangan dan ekonomi yang melanda ASEAN tahun 1997-1998 sehingga memicu kesadaran negara–negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan (Kemendag, 2015).

Dalam KTT ASEAN ke-2 informal tersebut, para kepala negara ASEAN melakukan kesepakatan Visi ASEAN 2020, dalam hal ini Indonesia pada masa Presiden Soeharto diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas (Tempo,1997). Visi ASEAN 2020 antara lain: (i) menciptakan kawasan ekonomi negara ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (ii) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (iii) meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*) yang dikenal dengan Bali Concord II yang membentuk AEC 2015. *AEC Blueprint* merupakan pedoman bagi negara–negara ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. *AEC Blueprint* memuat empat pilar utama yakni: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara–negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (Kemendag, 2008).

MEA merupakan bentuk kerjasama antar negara–negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Dengan adanya MEA menghilangkan hambatan lalu lintas barang dan jasa antar negara di kawasan ASEAN. Ada delapan profesi yang terkena kebijakan pasar bebas tenaga kerja MEA, yaitu teknik, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat (Wibowo, 2016).

Kesepakatan MEA sudah tentu mengakibatkan persaingan bebas di ASEAN dalam bidang perdagangan, pelaku usaha, dan ketenagakerjaan

serta tanpa terkecuali dalam bidang pendidikan. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan, apabila penduduk Indonesia memiliki kualitas kemampuan rendah maka akan kalah dalam persaingan. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang besar dan kompleks, maka tidak ada jalan lain selain meningkatkan mutu pendidikan (Pangestika, 2015:672).

Di era globalisasi saat ini menuntut peningkatan mutu pendidikan. Sistem pendidikan harus melakukan perubahan untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Sistem pendidikan harus memberdayakan berbagai komponen pendidikan yang mencakup kegiatan pembelajaran, tenaga pendidik (guru), peserta didik, sarana dan prasarana pembelajaran, dana, lingkungan masyarakat, serta kepemimpinan kepala sekolah (Asmarani, 2014:503).

Dalam usaha menghadapi berbagai tantangan MEA, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Usaha pemerintah melalui pembentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pembinaan individu atau kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi bagi angkatan kerja muda, instruktur, assesor serta dukungan untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Dalam hal ini, pemerintah mencoba mempersiapkan sumber daya manusia dalam bidangnya masing-masing (Wibowo, 2016).

Menurut Jalal (dalam Pangestika, 2015:672) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu dipengaruhi oleh pendidik yang profesional, sejahtera, dan bermartabat. Oleh karena itu adanya pendidik yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik (guru). Hayat (dalam Mariyana, t.th: 2) mengungkapkan "*Teacher Is The Heart Of Quality Education*", ungkapan ini berarti bahwa tenaga pendidik merupakan salah satu kunci kualitas pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 menyatakan “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik seorang guru ditandai dengan kemampuan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru perlu memiliki kemampuan memantau kemajuan belajar siswanya sebagai bagian dari kompetensi pedagogik dengan menggunakan berbagai teknik asesmen alternatif seperti pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, portofolio, maupun memajang karya seni siswa. Dalam kompetensi pedagogik, tenaga pendidik harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik.

Menurut Tight (dalam Mistar, 2014:3) mengelola pembelajaran yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan ajar kepada peserta didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan ajar serta merupakan sebuah cara dan proses hubungan timbal balik antara peserta didik dengan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan. Dalam kegiatan mengelola pembelajaran, guru melakukan proses perubahan positif pada tingkah laku peserta didik yang ditandai dengan berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, keterampilan, kecakapan, dan kompetensi serta aspek lain yang ada pada diri siswa. Sedangkan perubahan tingkah laku adalah keadaan yang lebih meningkat dari keterampilan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan aspirasi.

Selain dalam hal kompetensi pedagogik, guru juga harus memiliki kepribadian yang baik atau dapat dikatakan memiliki kompetensi kepribadian. Hal ini dilakukan agar bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Guru yang dipandang sebagai seorang figur yang baik

oleh peserta didiknya tidak hanya memiliki kemampuan berdiri didepan kelas untuk menyampaikan bahan ajar. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik karena kepribadian guru dapat menentukan apakah guru bisa menjadi pendidik yang baik atau akan menjadi perusak masa depan anak didik. Ujian berat bagi seorang guru dalam hal kepribadian adalah rangsangan yang memancing emosinya. Kestabilan dalam menjaga emosi sangat diperlukan namun tidak semua orang mampu melakukannya, selain itu setiap orang memiliki tingkat temperamen yang berbeda-beda. Guru yang mudah marah akan membuat peserta didik mudah takut sehingga dari ketakutan tersebut membuat peserta didik kurang minat dalam mengikuti pelajaran dan menurunkan tingkat konsentrasi. Hal ini dikarenakan ketakutan menimbulkan perasaan was-was pada diri peserta didik terhadap gurunya, khawatir apabila dimarahi gurunya sehingga membuyarkan konsentrasi peserta didik dan peserta didik takut untuk mencoba hal yang baru (Mustabsyiroh, 2016:15).

Kemarahan guru akan terwujud melalui kata-kata, ekspresi wajah, atau mungkin gerakan-gerakan tertentu bahkan ada yang berwujud hukuman fisik. Kemarahan yang berlebihan akan menunjukkan tingkat kematangan emosi guru. Dilihat dari penyebabnya, kemarahan ternyata disebabkan oleh peserta didik yang tidak mampu memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan, padahal mungkin peserta didik sudah belajar bersungguh-sungguh. Kematangan emosi seorang guru akan berkembang sejalan dengan pengalaman bekerja, selama guru tersebut mau belajar dari pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar jumlah usia atau masa kerjanya saja yang bertambah, namun bertambahnya kemampuan daam memecahkan masalah atas dasar pengalaman masa lalu (Mustabsyiroh, 2016:16).

Seorang guru yang pandai mengajar, menanamkan pemahaman ke peserta didik, bahkan dapat menjadi figur yang baik bagi peserta didiknya tidak akan lengkap apabila guru tersebut tidak pandai dalam bersosialisasi dengan masyarakat atau bahkan dengan wali murid. Oleh karena itu,

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 yang mengungkapkan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi sosial.

Apabila seorang guru memiliki kompetensi sosial, maka hal ini akan diteladani oleh para peserta didik. Selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, peserta didik juga harus diperkenalkan dengan kecerdasan sosial agar mereka memiliki hati nurani, rasa kepedulian, empati bahkan rasa simpati kepada sesama. Tugas dan fungsi guru bukan hanya memberikan pendidikan, mengajar, serta pelatihan saja, namun tugas yang melekat pada dirinya juga, yakni tidak hanya berkutat di sekolah akan tetapi juga di luar sekolah. Apabila seorang guru sudah mampu menerapkan kompetensi sosial khususnya di lingkungan sekolah, maka secara langsung guru tersebut telah menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki karakter yang lebih baik. Karena salah satu lingkup dari kompetensi sosial adalah guru mampu mengembangkan sikap positif terhadap peserta didik (Munawaroh, 2013:3).

Sikap dan perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah dapat diteladani oleh para peserta didik sehingga menjadi suatu alat pendidikan yang diharapkan akan membentuk kepribadian siswa kelak di masa dewasa. Sikap dan perilaku guru menjadi semacam bahan ajar yang secara langsung maupun tidak langsung yang diikuti oleh peserta didik atau dikenal dengan *hidden curriculum* (Riyati, 2012:2). Kompetensi sosial merupakan salah satu kategori alat transversal kompetensi individu dengan kemampuan untuk memahami perbedaan budaya dan personal dengan mempunyai perasaan empati, kerjasama, kompromi untuk beradaptasi dengan personal, pekerjaan, dan lingkungan belajar yang berbeda (Gedviliene, 2014:44).

Selain dari ketiga kompetensi tersebut, seorang guru juga dituntut untuk profesional. Profesional dalam hal ini mengandung makna dan cakupan yang komprehensif, tidak sekedar berkenaan kemampuan, pengetahuan serta keahlian, akan tetapi juga mensyaratkan integritas

kepribadian dan komitmennya. Seluruh kemampuan dan integritas sifat dan kepribadian tersebut menjadi satu kekuatan dalam diri seseorang untuk mewujudkan reputasi atau kinerja yang maksimal sesuai bidang tugas yang ditanggungnya (Sutarmento, 2009:17).

Profesionalisme guru dituntut untuk terus berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kebutuhan masyarakat. Hal ini termasuk tuntutan akan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik dalam cakupan regional, nasional maupun internasional. Menurut Sullivan (dalam Sutarmento, 2009:19) mengungkapkan standar profesional yakni memiliki pengetahuan yang dibutuhkan, keterampilan dan sikap, dimana seluruh guru mempunyai kemampuan untuk mendemonstrasikannya. Apabila guru tidak memiliki kompetensi atau tidak mampu menunjukkan etika yang dituntut padanya maka ia belum dapat dikatakan profesional dan dalam konteks kepercayaan yang tinggi maka guru harus dapat menunjukkan kemampuan yang terbaiknya. Untuk menunjang kemampuan profesionalismenya, maka guru membutuhkan keterampilan–keterampilan guna menanamkan kemampuan dan informasi sebagaimana tuntutan kurikulum.

Saat ini masyarakat, terutama orang tua sangat berkepentingan dengan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab guru untuk mewujudkan harapan dan cita–cita para orang tua peserta didik. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mulai berkembang dengan sangat mengagumkan dan telah banyak pekerjaan yang dahulu dikerjakan manusia kemudian beralih dikerjakan oleh teknologi, akan tetapi hal ini sangat berbeda untuk dunia pendidikan. Teknologi memang sudah merambah ke ranah pendidikan namun peran dari seorang guru tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Undang–Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 7 yang mengamanatkan

bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultur, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi, serta guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, mengingat betapa berat dan kompleksnya membangun pendidikan maka upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin kompeten dan profesional. Hal ini bertujuan untuk membangun pendidikan yang kokoh serta mampu terus-menerus melakukan perbaikan agar lebih berkualitas (Mustofa, 2007:76).

Untuk meningkatkan keterampilan tenaga pendidik, maka diperlukan upaya nyata baik dari guru itu sendiri maupun kepala sekolah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kompetensi oleh guru itu sendiri, seperti membaca buku-buku pendidikan, membaca dan menulis karya ilmiah, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, mengikuti pelatihan, mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG), melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), serta berpartisipasi aktif dalam organisasi profesional. Sedangkan upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah yakni melakukan pembinaan kepada guru-guru, memberikan supervisi, mengadakan penataran, melakukan kunjungan antar sekolah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan (Asmarani, 2014:504).

Membaca merupakan salah satu aktivitas yang memiliki banyak manfaat, maka seorang guru dituntut untuk banyak membaca dari berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, koran, internet, maupun media lainnya. Manfaat yang didapatkan dari membaca buku antara lain: melatih kemampuan berpikir, meningkatkan pemahaman, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mengasah kemampuan menulis,

mendukung kemampuan berbicara didepan umum, meningkatkan konsentrasi, dan sarana refleksi serta pengembangan diri (KPA,t.th). Dengan banyak membaca maka seorang guru tidak akan tertinggal informasi dan berita-berita yang beredar dimasyarakat khususnya mengenai dunia pendidikan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kompetensi profesional seorang guru. Membaca juga dapat dijadikan sarana pengembangan potensi yang ada dalam diri guru tersebut.

Selain melalui minat membaca, upaya untuk meningkatkan kompetensi guru juga dilakukan dengan menulis karya ilmiah. Pemerintah dalam Permenpan No.16 tahun 2009 pasal 11 mewajibkan guru golongan VI/e untuk melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang salah satu unsurnya adalah menulis karya ilmiah (Larasati, 2014:2).

Upaya peningkatan kompetensi guru, juga dapat dilakukan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif yakni dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan bersama dikelas secara profesional. Menurut Sukardiyono (2015:9) ada beberapa manfaat penelitian tindakan kelas, antara lain: (1) menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, (2) menumbuhkembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru, (3) mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran, (4) mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas, (5) dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru, (6) dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang,

nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh–sungguh. Dengan melakukan PTK maka guru akan meningkatkan kompetensi pedagogik.

Keikutsertaan guru dalam kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) juga berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi guru. MGMP, yang merupakan forum kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar yang terdiri Musyawarah dan Guru Mata Pelajaran. Melalui wadah MGMP diharapkan guru tetap mempertahankan kualitas profesionalnya sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan sekolah (Lestari, 2014:2). Selain mengikuti MGMP, guru juga dapat ikut dalam organisasi keprofesian seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Dalam makalah Syafe'i (2008) yang disampaikan pada seminar yang diselenggarakan ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Islam) menyatakan bahwa fungsi organisasi profesi guru antara lain: (1) sarana komunikasi, silaturahmi dengan guru, sekaligus sebagai pusat informasi tentang pembelajaran atau pendidikan, (2) wadah pembinaan dan pengembangan sikap profesional guru dan perlindungan atas haknya, (3) mitra pemerintah dan perguruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan, dan (4) sebagai sarana untuk melakukan perubahan–perubahan dan inovasi pendidikan di sekolah–sekolah ke arah yang lebih baik. Melihat dari fungsi organisasi profesi guru tersebut, maka hal itu dapat menjadi wadah bagi guru untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional.

Sedangkan upaya peningkatan kompetensi guru yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah yakni melakukan pembinaan dan pengembangan serta melakukan supervisi. Hal ini dikarenakan kepala sekolah merupakan salah satu variabel yang sangat dominan dalam mempercepat terjadinya perubahan menuju kemajuan di sekolah maka tugas dan fungsinya harus benar–benar optimal (Sutarjo, 2014:107). Lebih rinci upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru

menurut hasil penelitian Mukhtar (2015:116) antara lain: (1) melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, (2) memberi motivasi dengan cara menciptakan situasi harmonis dan saling kerjasama antar guru, (3) mengirimkan guru untuk mengikuti seminar dan pelatihan, mendatangkan tutor ke sekolah, (4) memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya, (5) mengevaluasi kinerja guru terhadap sasaran yang belum tercapai.

Dalam kenyataannya masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kompetensi guru. Minat guru dalam menulis masih dikatakan rendah. Hal ini dibuktikan 800.000 dari 1.000.000 guru tidak bisa menulis. Oleh karena hal tersebut maka 800.000 guru hanya berpangkat IV A. Beban mengajar yang sudah semakin padat, mendidik moral dan perilaku peserta didik serta tugas domestik guru yakni di rumah, membuat guru memiliki minat yang rendah dalam menulis karya ilmiah (Wahyudi, 2015).

Dalam hal kompetensi yang dimiliki oleh guru juga masih rendah, hal ini dibuktikan pada hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2015 yang menunjukkan 48 % guru masih rendah kompetensinya. Bahkan ada yang hanya dapat menjawab 1 pertanyaan dengan benar dari 100 soal (Hadi, 2015). Selain itu masalah kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru juga masih terjadi, seperti kasus kekerasan siswa SMP di Pemalang, Jawa Tengah yang dilakukan oleh guru. Guru tersebut menampar, memukul, dan menendang 2 siswanya karena belum melengkapi tugas yang diberikannya. Akibatnya 2 siswa tersebut harus dilarikan ke klinik di daerah Randudongkal, Pemalang. Kekerasan tersebut menunjukkan rendahnya kompetensi kepribadian seorang guru (Liputan6, 2015).

Selain permasalahan tersebut, di era MEA tuntutan untuk menguasai bahasa asing sangat diperlukan terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Menurut hasil penelitian EF (*Education First*) dalam penelitian terbarunya EF EPI 2015 (*EF English Proficiency*

Index) yang merupakan indeks pengukuran tingkat rata-rata kemampuan bahasa inggris orang dewasa suatu negara, menghasilkan susunan peringkat bahasa inggris dengan melakukan tes bahasa inggris pada 910.000 orang dewasa di 70 negara. Indonesia berada di urutan ke-32 dengan level kemampuan menengah (Tempo, 2015). Lebih spesifik lagi yakni hasil penelitian Yahya (2013:15) di SDN Idaman RSBI Banjarbaru, menunjukkan bahwa kemampuan guru yang masih terbatas dalam penguasaan bahasa inggris baik secara lisan maupun tertulis sehingga untuk menerapkan secara praktis dalam kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan sehari-hari masih sulit. Padahal di era pasar bebas saat ini penggunaan bahasa inggris menjadi sangat krusial yang mencakup persaingan sumber daya manusia, pendidikan, dan perekonomian.

Menurut Yusuf Muhyidin selaku Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyatakan kemampuan untuk berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting di era MEA ini. Peningkatan kompetensi bahasa inggris perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui lembaga pendidikan non-formal dengan tetap berdampingan dengan implementasi pendidikan formal. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pertama dan pemersatu nasional perlu turut diimbangi dengan bahasa Inggris yang menjadi bahasa pemersatu di dunia internasional. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kemampuan di sektor ekonomi dan bisnis, hingga aset untuk memenangkan persaingan di bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata serta berbagai sektor lainnya (Tempo, 2015).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kompetensi tenaga pendidik untuk menghadapi MEA melalui karakteristik kesiapan pembentukan kompetensi guru. Hal ini dikarenakan kompetensi pendidik pada akhirnya akan sangat menentukan kualitas pendidikan. Penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dikarenakan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai salah satu sekolah

tingkat menengah atas yang merupakan sekolah unggulan yang masih sangat diperhitungkan kualitasnya.

Berdasarkan hasil observasi, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki berakreditasi A. Sekolah tersebut, melakukan upaya pembentukan kompetensi guru berdasarkan standar normatif yang ditentukan pemerintah sesuai kurikulum 2013. Usaha-usaha yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi guru, antara lain: mengadakan *in-house training*, mengikutsertakan tenaga pendidik pada kegiatan seminar, penataran nasional, mengadakan pelatihan kepenulisan untuk karya ilmiah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, mengadakan pengajian untuk membentuk kompetensi kepribadian, dan membuat desa binaan guna membentuk kompetensi sosial. Dari usaha-usaha tersebut bukan berarti setiap pengajar yang ada di sekolah tersebut memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga untuk mengetahui tingkat kompetensi pendidik, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik kesiapan guru dalam pembentukan kompetensi di era MEA.

Dari beberapa permasalahan diatas berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “KESIAPAN TENAGA PENDIDIK SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA DALAM PEMBENTUKAN KOMPETENSI DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini yakni: “Bagaimana karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi pendidik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?”

Sedangkan rumusan masalah secara khusus dibagi menjadi 4 yakni:

1. Bagaimana karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi pedagogik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?
2. Bagaimana karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi kepribadian di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?
3. Bagaimana karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi sosial di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?
4. Bagaimana karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi profesional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi pedagogik di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- b) Untuk mengetahui karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi kepribadian di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- c) Untuk mengetahui karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi sosial di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- d) Untuk mengetahui karakteristik kesiapan guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam pembentukan kompetensi profesional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Guru

Diharapkan mampu meningkatkan kompetensi agar dapat meningkatkan profesionalisme dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten.

b) Bagi Sekolah

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

c) Bagi Penulis

Diharapkan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya kesiapan tenaga pendidik dalam pembentukan kompetensi sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan.